

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem otonomi daerah, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri. Berdasar kebijakan ini diharapkan tiap daerah mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masing-masing daerah. Ada banyak sektor yang bisa dikembangkan salah satunya adalah sektor pariwisata (Nurhadi, dkk. 2021; 325-326). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 4 tentang Kepariwisata, pariwisata bertujuan untuk: 1) upaya dalam menumbuhkan ekonomi, 2) mampu mensejahterakan masyarakat, 3) mengurangi masyarakat miskin, 4) mengurangi jumlah pengangguran, 5) pelestarian lingkungan alam dan budaya, 6) mengembangkan budaya, 7) meningkatkan citra negara, 8) meningkatkan rasa nasionalisme, 9) memperkokoh identitas dan persatuan bangsa, dan 10) memperkuat hubungan antar bangsa.

Bidang kepariwisataan merupakan salah satu pilar pembangunan nasional karena berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara, penghasilan daerah, pembangunan daerah, menyerap investasi dan tenaga kerja, serta mampu

merangsang sektor-sektor produktif lainnya. Program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya serta potensi pariwisata di tingkat daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi. Seperti sektor-sektor lainnya, dampak pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah atau negara tujuan wisata turut signifikan. Peran pemerintah menjadi krusial dalam mendukung pengembangan destinasi wisata baru, dengan memperhatikan lima faktor utama yang perlu dipenuhi untuk mengembangkan suatu daerah menjadi destinasi wisata, yaitu obyek wisata, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan akomodasi hotel (Pebriana, 2021:13).

Geografis dan topografis Indonesia mendukung sektor ini. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kebudayaan, adat istiadat, seni, dan warisan sejarah yang beraneka ragam dan tidak kalah menarik dengan keindahan alam yang dimiliki. Kekayaan alam dan budaya tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dalam sektor wisata. Indonesia telah menjadi destinasi pariwisata yang diminati oleh banyak wisatawan asing karena pesonanya yang ditawarkan oleh keindahan alam serta keragaman budayanya. Namun, pengembangan kepariwisataan masih terkonsentrasi di Pulau Bali dan Jogjakarta. Namun, banyak wilayah lain yang memiliki potensi dan daya tarik yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata, meskipun seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Data *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) dari *World Economic Forum* (WEF) menunjukkan meningkatnya ranking

pariwisata Indonesia. Pada tahun 2013 Indonesia rangking 70, kemudian tahun 2019 berada di posisi 40. Meskipun peringkat Indonesia semakin meningkat, hal tersebut tidak menandakan bahwa pengembangan sektor pariwisata sudah selesai sepenuhnya. Masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi di dalamnya. (Saragih & Surya, 2021: 38).

Pada tanggal 15 Juli 2019 Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengembangkan destinasi pariwisata super prioritas pada lima daerah yakni, Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika-Lombok (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara). Berikutnya, terdapat enam instruksi Presiden Jokowi dalam mengembangkan lima destinasi pariwisata super prioritas: 1) tentang tata ruang, 2) terkait akses dan jalan menuju lokasi wisata, 3) fasilitas di lokasi wisata, 4) training/ pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, 5) pemasaran produk lokal, 6) Promosi yang massif dan terpadu (Kementerian PUPR, 2020).

Dalam Wardani & Nasution (2016:5) disebutkan bahwa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025, pemerintah menetapkan kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) di sektor pariwisata, yang lebih lanjut dikenal sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kawasan wisata Danau Toba menjadi prioritas pengembangan daerah pariwisata dalam skala pelayanan nasional dan internasional. Sebagai daerah prioritas seharusnya daerah

wisata Danau Toba memiliki kondisi aspek pariwisata yang memenuhi syarat atau mencukupi dari pada daerah wisata lain yang bukan termasuk dalam KSPN. Berhubungan dengan itu maka, penting dilakukan identifikasi aspek-aspek dalam mengembangkan pariwisata untuk peningkatan kuantitas wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Danau Toba.

Terdapat tujuh kabupaten yang termasuk wilayah Danau Toba, yaitu Samosir, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Simalungun, Karo, dan Tapanuli Utara. Kabupaten Samosir dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2003, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Menurut regulasi ini, Kabupaten Samosir memiliki kewenangan otonom dalam pengelolaan sektor-sektor berbagai, termasuk sektor pariwisata.

Penetapan kriteria dan klasifikasi objek wisata di Kabupaten Samosir diatur melalui Keputusan Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara Nomor 474 Tahun 2017, yang bertujuan untuk mengembangkan destinasi pariwisata di wilayah tersebut. Kebijakan ini mengelompokkan objek wisata berdasarkan kriteria dan klasifikasi yang telah ditetapkan, sebagai langkah implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, serta Peraturan Daerah Kabupaten

Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, kebijakan ini menjadi landasan untuk pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir (Saputra & Ali, 2020: 574-575).

Dalam Saragih & Surya (2021: 69), Kabupaten Samosir dijuluki sebagai “Negeri Indah Kepingan Surga.” Tentunya julukan tersebut dibuktikan dengan kenyataan dan data-data di lapangan dimana banyaknya destinasi wisata terdapat di Pulau tersebut. Kabupaten Samosir terletak di tengah-tengah pulau yang berada di danau terbesar kelima di dunia. Samosir memiliki panjang kurang lebih 45 kilometer serta lebarnya kurang lebih 19 kilometer. Letak dan posisi strategis tersebut menjadikan Pulau Samosir memiliki pemandangan yang indah ditambah dengan latar deretan bukit barisan. Pulau Samosir berpotensi menjadi daerah tujuan wisata karena keasrian alamnya dan kesejukan udaranya. Selain keindahan alam yang luar biasa, Kabupaten Samosir memiliki banyak peninggalan sejarah atau situs budaya dan kesenian bahkan Samosir adalah daerah asalnya semua suku Batak. Berbagai objek wisata tersebut tersebar di sembilan kecamatan yang terdapat di Kabupaten Samosir.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Samosir 2015-2022

Tahun <i>Year</i>	Wisatawan/ <i>Tourist</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Asing <i>Foreign</i>	Nusantara <i>Domestic</i>	
2015	34248	141215	175463
2016	35823	154905	190728
2017	55771	222288	278059
2018	65724	312925	378649
2019	50970	367301	418271
2020	2908	402295	405203
2021	0	663848	663848
2022	2953	857939	860892

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, 2022

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir dari tahun 2015 hingga 2022 terus meningkat. Namun, pada tahun 2020, selama masa pandemi Covid-19, terjadi penurunan signifikan sebesar -3,12 persen. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir mengalami peningkatan kembali, mencapai 663.848 kunjungan, dengan catatan bahwa kunjungan tersebut berasal dari wisatawan nusantara. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir mengalami peningkatan signifikan sebesar 29,68 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan meningkat dari 663.848 kunjungan pada tahun 2021 menjadi 860.892 kunjungan pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 857.939

kunjungan berasal dari wisatawan nusantara (99,66 persen), sementara 2.953 kunjungan berasal dari wisatawan asing (0,34 persen).

Salah satu destinasi wisata terkenal di Kabupaten Samosir adalah Kampung Ulos Hutaraja, yang terletak di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Dilansir dari [suarausu.or.id](http://suarausu.or.id) (2023), kampung ini dikenal sebagai pusat pembuatan kain ulos khas Batak yang diproduksi secara manual, dengan latar belakang Rumah Bolon. Meskipun Kampung Ulos Hutaraja sudah ada sejak lama, proses pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya dilakukan. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke kawasan ini. Dengan kunjungan langsung dari Presiden Jokowi, kampung ini diangkat menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba. Pada kesempatan tersebut, Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono untuk melakukan revitalisasi dan penataan kembali kawasan ini. Sehingga yang dulunya merupakan desa perkampungan biasa dan terkesan kurang terawat, namun sekarang sudah tertata rapi dan menarik minat para pengunjung baik lokal maupun turis asing. Setelah dilakukan revitalisasi besar-besaran, kemudian diresmikan pada tanggal 2 Februari 2022 lalu.

Menurut situs resmi Kementerian PUPR (2019), Kampung Hutaraja adalah salah satu permukiman di sekitar Danau Toba yang dipilih oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk direvitalisasi karena memiliki komunitas budaya yang

menarik (gambar 1.1). Kampung Hutaraja terkenal sebagai permukiman tradisional suku Batak Toba yang memiliki Komunitas Pengrajin Tenun Kain Ulos dan beberapa Rumah Adat Batak Gorga yang masih ada hingga saat ini. Ciri khas dari desa ini dapat dilihat secara langsung. Para pengunjung akan melihat sendiri para penenun setiap harinya yang menenun ulos di halaman Rumah Bolon. Hal ini menjadi daya tarik wisata budaya karena dapat dilihat secara langsung oleh wisatawan bagaimana proses pembuatan kain ulos. Selain itu, alat ulos yang digunakan masih manual.



Gambar 1. 1 Kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) dan Kementerian PUPR (kanan) ke Kampung Hutaraja

(Sumber: sahabat.pu.go.id, (2019)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pangaribuan, dkk (2022 : 70) disebutkan bahwa Salah satu fasilitas yang sangat penting bagi wisatawan yang berkunjung ke Hutaraja adalah tempat tinggal atau homestay. Oleh karena itu, pemerintah melakukan revitalisasi dan renovasi rumah warga agar layak digunakan sebagai homestay. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk

meningkatkan kualitas dan ketersediaan akomodasi bagi wisatawan serta mendukung program pengembangan pariwisata pemerintah di sekitar Danau Toba. Proses penataan ulang dimulai pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2021. Rencana penataan ulang kawasan Kampung Ulos Hutaraja melibatkan sejumlah pekerjaan, antara lain revitalisasi atap Rumah Bolon yang sudah ada di sekitar kawasan. Selain itu, terdapat pembangunan Rumah Bolon baru, pembangunan Pusat Informasi Budaya Galeri dan Souvenir, penataan Pagar Makam, amfiteater atau plaza, Pembangunan coffee shop, dan pembangunan toilet umum. Keseluruhan penataan Kampung Ulos Hutaraja memerlukan biaya sekitar Rp 25,8 miliar, dengan luas lahan sekitar 16 ribu meter persegi. Kemudian, eksistensi Komunitas Pengrajin Kain Ulos menjadi fondasi utama dalam pembentukan permukiman Kampung Hutaraja, sehingga berhasil menarik perhatian pemerintah pusat untuk mengembangkannya menjadi suatu permukiman wisata. Melalui inisiatif ini, diharapkan masyarakat setempat tidak hanya merasa terpinggirkan atau menjadi penonton dalam pengembangan sektor pariwisata, melainkan dapat aktif ikut serta dan merasakan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pemerintah Kabupaten Samosir diharapkan untuk menunjukkan komitmen dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan mengadopsi perencanaan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal ini memungkinkan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal. Pengembangan pariwisata akan berdampak positif pada

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan kesan positif wisatawan terhadap aset pariwisata yang ada. Pengembangan daerah wisata tanpa perencanaan yang tepat dapat memunculkan masalah dan kurang optimalnya pengelolaan potensi wisata. Pengembangan objek wisata tidak hanya difokuskan pada peningkatan objek itu sendiri, melainkan juga mencakup peningkatan pada komponen-komponen penunjangnya, agar dapat diarahkan dan diakomodasi dengan lebih baik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menegaskan jika pemerintah daerah berperan penting untuk mengembangkan potensi wisata, meningkatkan potensi pariwisata, seperti pemberian fasilitas, pendorongan investasi, pengembangan pariwisata, pengelolaan pariwisata, serta pengalokasian anggaran. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan strategi terkait arah pariwisata agar pengembangan pariwisata berjalan dengan optimal. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan ada berbagai bidang yang memerlukan perhatian dalam proses pembangunan dan pengembangan pariwisata, antara lain daya tarik wisata, aksesibilitas, prasarana dan sarana, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, Oka A. Yeti (1997:165) ada aspek pendukung lain dalam membangun dan mengembangkan daerah wisata antara lain 3A, *Attraction* (Daya Tarik), *Accessibility* (Akses), dan *Amenities* (Kenyamanan).

Dengan memperhatikan fenomena dan ide-ide yang ada, Kampung Hutaraja menjadi pilihan penelitian yang tepat untuk memperkuat upaya pengembangan Permukiman Tradisional Batak Toba dalam konteks pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Danau Toba. Maka penelitian ini akan mengkaji peranan pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Samosir dalam upaya pengelolaan dan pengembangan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja. Serta penting untuk melakukan identifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam upaya pengembangan permukiman tradisional Batak Toba sebagai destinasi wisata.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merumuskan fokus permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Samosir dalam upaya pengembangan potensi pariwisata khususnya pada Objek Wisata Kampung Ulos Hutaraja?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengembangkan potensi pariwisata khususnya pada Objek Wisata Kampung Ulos Hutaraja?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan konkret. Dalam konteks penelitian mengenai strategi pengembangan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja di Kabupaten Samosir, tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mengembangkan potensi wisata Kampung Ulos Hutaraja.
2. Untuk menganalisis factor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan potensi wisata pada Kampung Ulos Hutaraja.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mengembangkan pemahaman ilmiah terkait strategi pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi, tambahan informasi, dan bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan serta kebijakan terkait strategi dalam mengembangkan potensi pariwisata.

- b. Bagi masyarakat

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan pengetahuan yang bernilai mengenai objek wisata Kampung Ulos Hutaraja bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan potensi

pariwisata yang dimiliki dapat berkembang dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

## **1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan untuk membandingkan serta sebagai memperdalam dan memperluas kajian teori yang digunakan. Berikut merupakan tabel dari penelitian terdahulu yang telah diolah oleh penulis dari berbagai sumber, yaitu:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1.	Maškarin dan Ribari, 2013	<i>Government Intervention in Driving The Development of Sustainable Tourism</i>	Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan mengevaluasi model-model yang telah ada dan secara sistematis menganalisis masalah serta hambatan lainnya yang terkait dengan sektor pariwisata Kroasia yang menunjukkan perlunya tindakan	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi strategis pemerintah dalam sektor pariwisata berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pariwisata dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk mencapai hasil yang lebih baik di bidang pariwisata. Makalah ini juga memberikan analisis singkat tentang langkah-langkah intervensi pemerintah dan tindakan yang dilakukan hingga saat ini, dan mengusulkan langkah-langkah baru yang lebih intensif dan lebih komprehensif. Seperti (1) Tindakan terkoordinasi dan kerja sama Kementerian Pariwisata dan

			intervensi. Penelitian ini juga memberikan analisis singkat dan mengusulkan tentang langkah-langkah intervensi pemerintah.	lembaga lain yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan pariwisata (2) memberikan berbagai proyek investasi, (3) melaksanakan reformasi kelembagaan (4) dan mengadopsi rencana tata ruang.
2.	Febrianingrum et al., 2019	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pariwisata Pantai di Kabupaten Purworejo	Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, random sampling untuk kuesioner, wawancara dengan purposive	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor pendorong dalam perkembangan pariwisata pantai melibatkan ketersediaan jaringan jalan yang memadai, jarak destinasi wisata dengan tempat asal wisatawan, partisipasi aktif masyarakat, dan tingkat keamanan di destinasi wisata. (2) Faktor-faktor yang menghambat perkembangan pariwisata pantai mencakup

			sampling, dan studi dokumen. Untuk mengevaluasi tingkat kepentingan dari berbagai aspek dan faktor yang berpengaruh, penelitian ini menggunakan teknik analisis skoring.	keterbatasan kebutuhab sarana dan prasarana, kelengkapan sarana pelabuhan perikanan, ketidakintegrasian moda transportasi umum antar destinasi wisata pantai, peranan lembaga pengelola pariwisata, dan pemanfaatan media untuk promosi wisata yang belum optimal. Adapun faktor-faktor yang bersifat moderat termasuk variasi atraksi wisata, keanekaragaman hayati sebagai daya tarik wisata, pelayanan yang berkualitas oleh Masyarakat kepada wisatawan, ketersediaan fasilitas kebencanaan pesisir, dan tindakan mitigasi bencana di pesisir pantai.
3.	Primadany, Mardiyono,	Analisis Strategi Pengembangan	Penulis mengadopsi metode penelitian	Temuan peneliti bahwa Nganjuk memiliki banyak objek wisata yang menarik dan memiliki kekhasan

	dan Riyanto, 2013	Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)	deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui langkah-langkah prosedur yang melibatkan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	tersendiri di wilayah tersebut. Namun, kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam hal promosi menjadi kendala bagi kemajuan pariwisata di Nganjuk. Bukti dari pernyataan tersebut adalah bahwa program- program terkait pengembangan wisata di daerah Nganjuk masih terhambat oleh keterbatasan dana. Selain itu, belum adanya peraturan daerah khusus yang mengatur strategi pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut juga menjadi faktor penghambat. Akibatnya, program-program yang telah disusun oleh Disbudpar Nganjuk belum berjalan optimal.
4	Herliyani,	Peran Dinas	Dalam penelitian ini,	Hasil penelitian ini mengenai peran Dispopar

	Putri Titis. 2019	Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Danom Layong Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser	penulis menerapkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data primer melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan menerapkan model interaktif.	dalam pengelolaan daya tarik wisata Danom Layong di Kecamatan Longkali antara lain (1) sebagai motivator, berperan dalam mengajak pihak lain seperti swasta, kelompok masyarakat, pemerintah desa, dan pokdarwis untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata tersebut. (2) sebagai fasilitator, Dispopar memberi fasilitas terkait sarana dan prasarana, dan memenuhi kebutuhan beragam baik masyarakat lokal maupun wisatawan lokal dan mancanegara. (3) Kemudian sebagai dinamisator, Dispopar memberikan anggaran untuk pengembangan wisata tersebut. Hambatan- hambatan dalam Dispopar mencakup beberapa faktor, termasuk sulitnya akses, kurangnya
--	----------------------	--	--	--

				keterlibatan masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, dan ketidaktersediaan anggaran tetap dalam satu periode tertentu.
5.	Anggraeni dan Fadlurrahman, 2017	Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Dalam Pengembangan Objek Wisata	Metode penelitian deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis interaktif, yang mencakup tahapan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah melaksanakan perannya dalam pengembangan Objek Wisata sesuai dengan paradigma yang diajukan oleh Pitana dan Gayatri (2005) tentang peran Pemerintah Daerah. Fungsi-fungsi seperti motivator, fasilitator, dan dinamisator telah diimplementasikan, meskipun masih terdapat kekurangan dalam optimalitas pelaksanaannya. Hal ini disebabkan kendala seperti Anggaran, kualitas SDM yang rendah, SDA yang

			<p>pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.</p>	<p>jauh dan sulit dijangkau, promosi yang kurang, investor masih sedikit, dan regulasi yang masih selalu diperbaiki.</p>
--	--	--	--	--

Sumber: Olahan data penulis (2022)

Maka, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kampung Ulos Hutaraja, yang merupakan salah satu objek wisata di sekitar kawasan Danau Toba yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Pariwisata (KSPN). Kampung Ulos Hutaraja direvitalisasi pada tahun 2019 dan diresmikan oleh presiden Indonesia Joko Widodo, pada 2 Februari 2022. Perbedaan ini menciptakan peluang untuk memahami perkembangan dan perubahan dalam objek wisata yang masih dalam tahap pengembangan, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu mengamati objek wisata yang sudah mapan dan beroperasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk mengungkapkan bagaimana proses pengembangan dan perubahan dalam lingkungan wisata yang relatif baru, serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam tahap perkembangan ini.

## **1.6 Kajian Teori**

### **1.6.1 Peran Pemerintah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata**

Peranan berasal dari kata peran yang diambil dari istilah seni film/drama, yang merujuk pada perilaku, tindakan, pemain, atau pelaku. Sementara itu, peranan (*role*) mengacu pada fungsi, kedudukan, atau bagian dalam suatu kedudukan (Dahlan, 1994: 501). Peran mengacu pada perilaku yang dianggap sesuai dengan status seseorang. Oleh karena itu, peran memiliki keterkaitan yang erat dengan status, karena mencakup aspek-aspek dinamis dari status di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang terkait. Berdasarkan konteks kelembagaan lainnya, dimana peranan tersebut mencerminkan tata institusional (*institutional order*) dari lembaga tersebut, seperti yang terjadi dalam konteks pemerintahan (Berger dan Luckman dalam Dharma (2018) . Oleh karena itu, peranan dapat diartikan sebagai pelaksanaan fungsi oleh pemerintah daerah, yang mencakup Gubernur, Bupati, atau Walikota, beserta perangkat daerah sebagai unsur yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1, ayat 3.

Pengembangan merujuk pada proses membuat sesuatu yang belum ada atau memperluas sesuatu yang sudah ada. Dalam konteks pembangunan, pengembangan secara khusus merujuk pada pengembangan dalam bidang ekonomi. Di sisi lain, pengembangan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia. Menurut Sugiono sebagaimana disampaikan oleh Manahati Zebua (2016), pengembangan memiliki makna proses pembangunan yang dilakukan secara bertahap, teratur, dan mengarah menuju tujuan yang diinginkan.

Menurut Sunaryo, seperti yang dikutip oleh Amalyah et al. (2016), menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu transformasi yang dilakukan secara terencana oleh individu terhadap kondisi kepariwisataan yang dianggap kurang memadai, dengan tujuan mencapai kondisi kepariwisataan yang semakin membaik. Menurut Suwanto, sebagaimana dijelaskan oleh Amalyah et al. (2016), ada lima unsur utama yang harus diperhatikan dalam mendukung pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangannya. Kelima unsur tersebut mencakup objek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, tata laksana/infrastruktur, serta masyarakat dan lingkungan.

Berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969, disebutkan dalam Pasal 2 bahwa tujuan dari pengembangan sektor pariwisata adalah:

1. Meningkatkan pendapatan devisa Negara, memperluas peluang dan lapangan kerja, serta mendorong aktivitas industri-industri penunjang dan sektor-sektor industri pendukung lainnya.
2. Mengenalkan dan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya Indonesia.

3. Menjalin hubungan persaudaraan dan persahabatan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Yoeti (2008:239) mengemukakan bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, ada empat prinsip yang harus diperhatikan agar tujuan tersebut tercapai, yakni:

1. Setiap individu yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata harus berkomitmen untuk memelihara keseimbangan ekologi, serta mengupayakan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan.
2. Pertumbuhan sektor pariwisata sebagai industri harus senantiasa menjaga dan mempertahankan nilai-nilai sosial yang menjadi bagian hidup masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran terhadap perilaku wisatawan asing yang harus sesuai dengan karakteristik dan norma kepribadian bangsa setempat.
3. Pertumbuhan sektor pariwisata sebagai industri sepatutnya melibatkan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat, terutama penduduk lokal yang seharusnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan tersebut, bukan hanya menjadi penonton di wilayah tempat tinggal mereka sendiri.
4. Pengembangan industri pariwisata sebaiknya dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan

peluang berusaha, lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penerimaan pajak, kontribusi terhadap pendapatan nasional, dan sekaligus dapat memperkuat neraca pembayaran negara.

Kemajuan suatu destinasi wisata juga sangat bergantung pada apa yang dapat dipersembahkan oleh destinasi tersebut kepada para wisatawan. Hal ini tak lepas dari peran para pengelola destinasi wisata. Yoeti (1996) menyatakan bahwa keberhasilan suatu tempat wisata hingga mencapai tingkat industri sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu daya tarik (*attraction*), aksesibilitas yang mudah (*accessibility*), dan fasilitas yang tersedia (*amenities*).

1. Atraksi pariwisata (*attraction*), mengacu pada elemen-elemen yang telah dipersiapkan sebelumnya agar dapat dinikmati dan dilihat oleh wisatawan, termasuk di dalamnya tari-tarian, pertunjukan kesenian tradisional, upacara adat, dan hal-hal serupa. Istilah "*attractive spontaneity*" dalam dunia pariwisata mengacu pada segala sesuatu yang ada di destinasi wisata yang menjadi daya tarik untuk mendorong orang-orang untuk berkunjung ke tempat tersebut.
2. Aksesibilitas (*accessibility*), dalam konteks pariwisata sangat dipengaruhi oleh transportasi dan komunikasi, terutama faktor jarak dan waktu yang dapat memengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Transportasi menjadi unsur kunci dalam menciptakan aksesibilitas, membuat jarak terasa lebih dekat. Selain transportasi, elemen-elemen yang terkait dengan aksesibilitas melibatkan prasarana

seperti jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara. Prasarana ini berperan penting dalam menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya. Keberadaan sarana transportasi turut memengaruhi tingkat efisiensi transportasi itu sendiri, dan kondisi prasarana yang baik dapat meningkatkan optimalitas laju transportasi.

3. Fasilitas (*amenties*), dalam konteks pariwisata, terutama akomodasi perhotelan, memegang peran penting dalam memastikan kenyamanan wisatawan selama berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Fasilitas wisata mencakup berbagai elemen yang mendukung kenyamanan, seperti akomodasi penginapan, restoran, penyediaan air bersih, sarana komunikasi, hiburan, dan aspek keamanan.

Dalam pengembangan kepariwisataan, Diperlukan keterlibatan pemerintah dalam manajemen pariwisata yang terencana secara menyeluruh. Secara umum, peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata melibatkan penyediaan infrastruktur, yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik, melainkan juga mencakup perluasan berbagai fasilitas, koordinasi kegiatan antara instansi pemerintah dan sektor swasta, serta regulasi dan promosi destinasi pariwisata ke tingkat lokal maupun internasional. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan menyediakan infrastruktur yang mendukung kebutuhan pariwisata. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah juga berfungsi sebagai panduan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan peran mereka.

Dalam pengembangan aktivitas pariwisata, peran pemerintah mengharuskan keberadaan organisasi yang efisien di tingkat daerah. Organisasi pariwisata bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi para wisatawan, serta untuk meningkatkan ekonomi daerah dengan harapan bahwa pariwisata dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang dapat diandalkan untuk mengelola pariwisata sebagai objek unggulan, mengingat permintaan akan kegiatan wisata yang terus meningkat dari masyarakat.

Organisasi yang diberi kewenangan untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya diharapkan mampu melaksanakan kebijakan yang umumnya diterapkan oleh organisasi pariwisata adalah;

1. Berupaya memastikan kepuasan wisatawan dengan memanfaatkan semua fasilitas dan potensi yang tersedia.
2. Berkoordinasi antara berbagai usaha, lembaga, instansi, dan jabatan adalah upaya dengan tujuan untuk memajukan industri pariwisata.
3. Melakukan sosialisasi konsep pariwisata kepada masyarakat bertujuan agar mereka memahami manfaat dan risiko yang terkait dengan pengembangan pariwisata sebagai industri.
4. Melakukan program riset dengan tujuan meningkatkan kualitas produk wisata dan mengembangkan produk baru untuk menguasai pasar di masa yang akan datang.

5. Menyediakan segala perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pariwisata.
6. Merancang kebijakan pengembangan sektor pariwisata berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara teratur dan terencana.

Dengan merujuk pada konsep yang telah diajukan oleh para ahli dalam bidang pengelolaan pariwisata, dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teori yang dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri (2005:95). Teori ini mengidentifikasi tiga peran kunci pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata, yaitu sebagai berikut:

1. Motivator

Pitana dan Gayatri (2005: 95) menyatakan bahwa peran pemerintah sebagai motivator dalam pengembangan destinasi wisata melibatkan usaha untuk memotivasi masyarakat atau pihak eksternal agar terlibat aktif dalam pembangunan dan kemajuan destinasi wisata tersebut. Pandangan ini sejalan dengan perspektif Sardiman (2007: 175), yang mengartikan motivator atau motivasi sebagai dorongan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan usaha pariwisata, melibatkan investor, masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata. Dengan memahami konsep ini, pemerintah dapat bertindak sebagai motivator dengan mendorong dan memberi dorongan kepada masyarakat setempat untuk mengambil

tindakan positif yang mendukung pengembangan pariwisata. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat pembangunan pariwisata melalui kerjasama dengan pihak eksternal untuk memajukan destinasi wisata di wilayahnya. Pendekatan motivasi ini dapat diimplementasikan melalui program sadar wisata, pelatihan manajemen usaha pariwisata, dan pemberian insentif finansial bagi inisiatif berbasis masyarakat.

## 2. Fasilitator

Menurut Pitana dan Gayatri (2005: 95), fungsi pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan destinasi wisata melibatkan upaya untuk memfasilitasi segala kegiatan yang mendukung peningkatan potensi yang diinginkan. Dalam konteks ini, pemerintah berperan dalam menyediakan dukungan dan fasilitas baik fisik maupun nonfisik yang mendukung berbagai program pariwisata. Fasilitas fisik mencakup pembangunan infrastruktur pendukung wisata, penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, fasilitas nonfisik mencakup dukungan usaha, dukungan finansial, dan promosi pariwisata yang diinisiasi oleh pemerintah.

## 3. Dinamisator

Berdasarkan konsep yang diuraikan oleh Pitana dan Gayatri (2005: 95) tentang pentingnya good governance, di mana kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan yang optimal. Sebagai salah satu pihak yang

terlibat dalam pembangunan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kerjasama di antara ketiga pihak tersebut, dengan tujuan terwujudnya hubungan simbiosis mutualisme yang menguntungkan bagi kemajuan daerah. Pemerintah daerah, sebagai pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata, memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan, serta mengajak seluruh komponen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Biasanya, sektor ini bertanggung jawab atas perencanaan dan fungsi manajerial yang diperlukan untuk menciptakan koordinasi yang efektif antara semua sektor dalam industri pariwisata.

Teori Pitana dan Gayatri (2005) mengenai peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata, yang melibatkan fungsi motivator, fasilitator, dan dinamisator, dipilih sebagai kerangka konseptual dalam penelitian ini. Pemilihan teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa teori tersebut menyediakan kerangka konseptual yang relevan dan kuat untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di tingkat lokal. Pertama, teori ini memungkinkan peneliti untuk memahami peran pemerintah sebagai motivator yang memberikan insentif dan dorongan kepada pelaku pariwisata lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan sektor ini. Kedua, teori ini memungkinkan analisis peran pemerintah sebagai fasilitator, yang menyediakan infrastruktur, regulasi, serta dukungan dalam memperlancar kegiatan wisata. Terakhir, konsep dinamisator dalam teori ini memungkinkan

peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah telah berperan dalam menginisiasi perubahan dan inovasi yang dapat meningkatkan perkembangan pariwisata. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menganalisis sejauh mana pemerintah daerah di Kampung Ulos Hutaraja berperan dalam masing-masing dimensi ini dengan menggunakan data dari wawancara, analisis dokumen, atau observasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di tingkat lokal. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan lebih lanjut dalam konteks pengembangan pariwisata.

### **1.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Pariwisata**

Dalam KBBI, faktor adalah suatu hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Pengembangan tidak hanya melibatkan perubahan dalam jumlah atau ukuran, tetapi juga perubahan dalam kualitas. Lebih dari itu, pengembangan merupakan usaha untuk memajukan, meningkatkan, atau memperbaiki sumber daya, proses, dan produk yang sudah ada. Dalam Eddyono (2021:75) Pengembangan merupakan bagian integral dari manajemen yang menekankan pelaksanaan potensi pariwisata dalam suatu periode waktu tertentu. Proses ini melibatkan serangkaian langkah sistematis yang bertujuan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan manajemen yang telah ditetapkan. Fokusnya adalah mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang

telah direncanakan, dengan melibatkan kegiatan yang sangat spesifik. Dengan demikian, tujuan utama pengembangan adalah untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan keseimbangan produk pelayanan pariwisata.

Berdasarkan definisi tersebut, pengembangan produk pariwisata merujuk pada serangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan kondisi suatu objek dan daya tarik wisata. Hal ini dilakukan agar objek wisata tersebut menjadi stabil, diminati, dan dipilih oleh wisatawan, serta mampu memberikan manfaat baik bagi masyarakat setempat maupun pengelola. Lebih lanjut, pengembangan ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bagi pengelola dan pemerintah melalui industri pariwisata.

Dalam perkembangan pariwisata, terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pertumbuhan industri tersebut. Hal ini serupa dengan pendapat Eddyono, (2021:76) dalam bukunya yang berjudul "Pengelolaan Destinasi Pariwisata" disebutkan ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam mengembangkan pariwisata seperti di bawah ini:

### **1. Atraksi Wisata**

Atraksi wisata, diterjemahkan dari istilah "*Attraction*" dalam bahasa Inggris, merujuk pada segala sesuatu yang memiliki daya tarik, baik itu berbentuk fisik maupun non-fisik. Meskipun istilah "*attraction*" dapat mencakup berbagai hal, pengertian atraksi wisata sering diartikan secara sempit sebagai "pertunjukan", sedangkan istilah "*attraction*" diartikan sebagai "obyek"

wisata. Dalam konteks ini, penulis memilih menggunakan istilah "atraksi wisata" daripada "obyek wisata" karena istilah yang pertama lebih mencakup segala sesuatu yang dapat menarik, sementara istilah yang kedua memiliki konotasi yang lebih terbatas kepada objek mati yang belum tentu memiliki daya tarik. Menurut Bakaruddin (2008), pengertian obyek wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat, dinikmati, dan memberikan kesan khusus, yang dinilai melalui sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengelola dan melestarikan atraksi wisata dengan baik guna menciptakan daya tarik yang kuat bagi wisatawan yang ingin mengunjungi suatu destinasi.

## **2. Fasilitas**

Fasilitas dalam konteks pariwisata adalah komponen integral dalam pengalaman perjalanan wisatawan. Mereka mencakup berbagai elemen yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan para pengunjung selama kunjungan mereka ke destinasi wisata tertentu. Fasilitas ini bervariasi dari akomodasi seperti hotel dan penginapan, yang menyediakan tempat tinggal selama masa kunjungan, hingga sarana transportasi seperti bandara, terminal, dan stasiun kereta api, memfasilitasi kedatangan dan keberangkatan wisatawan. Selain itu, tempat-tempat wisata, restoran, dan kafe, yang menawarkan pengalaman lokal dalam hal kuliner, serta pusat informasi wisata yang membantu pengunjung dalam merencanakan

perjalanan mereka, semuanya termasuk dalam kategori fasilitas pariwisata. Fasilitas ini juga meliputi tempat rekreasi seperti kolam renang dan lapangan golf, serta pusat belanja untuk berbelanja oleh-oleh dan souvenir. Dengan demikian, fasilitas pariwisata berperan penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang memuaskan, meningkatkan daya tarik destinasi, dan memberikan dampak ekonomi positif bagi komunitas setempat.

### **3. Infrastruktur**

Infrastruktur dalam industri pariwisata mencakup semua fasilitas, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang mendukung pertumbuhan dan memberikan pengalaman positif bagi para wisatawan. Fasilitas pariwisata penting bagi para wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama berada di destinasi wisata. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas pariwisata yang lengkap dan kualitas pelayanan yang baik di dalamnya sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan industri pariwisata. Infrastruktur meliputi sarana dan prasarana dimana sarana yang biasanya terdiri dari rumah makan, penginapan, toilet, sarana kesehatan, keamanan, dan tempat ibadah. Prasarana, pada konteks ini, mencakup elemen-elemen seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, sistem drainase, jaringan internet, dan manajemen sampah. Untuk itu infrastruktur merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pariwisata baik di daerah pesisir pantai dan perbukitan (Febrianingrum et al., 2019).

#### **4. Transportasi**

Dalam pengalaman perjalanan wisata, faktor transportasi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kepuasan wisatawan. Transportasi mencakup kemudahan dalam mencapai destinasi wisata, dan seringkali faktor ini diabaikan oleh wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka. Namun, faktor ini dapat berdampak secara langsung terhadap anggaran perjalanan mereka.

Sistem transportasi umumnya menggunakan jaringan jalan sebagai infrastruktur utama, yang menjadi salah satu pendorong utama perkembangan pariwisata. Jaringan jalan berfungsi sebagai sirkulasi utama yang menghubungkan berbagai objek wisata, mempermudah akses wisatawan ke destinasi yang diinginkan. Selain jaringan jalan, faktor lain yang berpengaruh adalah posisi geografis. Posisi geografis destinasi wisata menjadi faktor kunci dalam pengembangan pariwisata karena memengaruhi hubungan antara segmen pasar dan destinasi pariwisata. Jarak yang dekat antara asal wisatawan dan destinasi wisata dapat meningkatkan mobilitas karena dapat dengan mudah dijangkau (Wardhono, 2014).

#### **5. Hospitaliti**

Hospitaliti adalah sikap, perilaku, dan pelayanan yang ramah, hangat, dan peduli terhadap tamu atau orang lain yang datang ke suatu tempat atau lingkungan tertentu. Ini terkait dengan cara pelaku usaha pariwisata

menyediakan fasilitas guna memenuhi kebutuhan wisatawan dan memberikan pelayanan berkualitas kepada mereka. Ini mencakup kemampuan untuk menyambut tamu dengan tulus, merasa senang dengan kehadiran mereka, dan berusaha keras untuk memberikan pengalaman yang positif selama kunjungan mereka. Selain itu, aspek keamanan sosial bagi wisatawan juga menjadi pertimbangan, yang mencakup sejauh mana kejadian tindak kejahatan terjadi di kawasan pariwisata. Selanjutnya, kaitannya dengan keamanan terhadap bencana dan upaya mitigasi bencana juga memiliki dampak pada perkembangan pariwisata. Tingkat kerawanan terhadap bencana pada suatu kawasan wisata dapat berpengaruh signifikan, karena bencana dapat menyebabkan kerugian yang dapat memengaruhi perkembangan industri pariwisata di wilayah tersebut.

Pendapat Eddyono dalam bukunya yang berjudul "Pengelolaan Destinasi Pariwisata" (2021:76) mengenai faktor-faktor pengembangan potensi pariwisata dapat digunakan sebagai kerangka teoritis yang relevan dengan pengembangan pariwisata, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir. Selain itu, teori ini juga akan membantu dalam memahami situasi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Samosir dalam mengembangkan potensi pariwisatanya. Ini dapat membantu dalam merancang rekomendasi atau strategi yang lebih relevan dan efektif untuk pemerintah daerah setempat.

## **1.7 Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan penjelasan terkait setiap variabel atau indikator dalam penelitian, bertujuan untuk mempermudah pengukuran dengan menerapkan teori yang relevan. Adapun defenisi operasional mengenai peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Samosir, diantaranya yaitu:

- a. Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata merujuk pada segala langkah dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab, kewenangan, dan kewajibannya. Ini melibatkan berbagai tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memajukan potensi pariwisata di wilayahnya. Dalam konteks ini, peran tersebut mencakup sebagai motivator bagi masyarakat lokal untuk mendukung pertumbuhan pariwisata, sebagai fasilitator dalam penyediaan sarana pendukung pariwisata, dan sebagai dinamisator dalam menjalin kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan pariwisata. Uraiannya sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Konsep Operasional Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata

Konsep	Definisi	Dimensi Konsep
Motivator	Pemerintah daerah menginspirasi atau menggalakkan masyarakat dan pihak luar untuk bekerja bersama dalam pembangunan dan peningkatan objek wisata tersebut.	1. Program penyuluhan dan sosialisasi 2. Pelatihan dan pendampingan wisata
Fasilitator	Pemerintah daerah memfasilitasi atau menyediakan segala fasilitas baik fasilitas fisik maupun nonfisik yang mendukung segala program pariwisata.	1. Kegiatan pendampingan usaha 2. Finansial 3. Promosi wisata 4. Penyediaan sarana dan prasarana
Dinamisator	Pemerintah berperan untuk mensinergiskan peran ketiga pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal.	Menjalin kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya pembangunan.

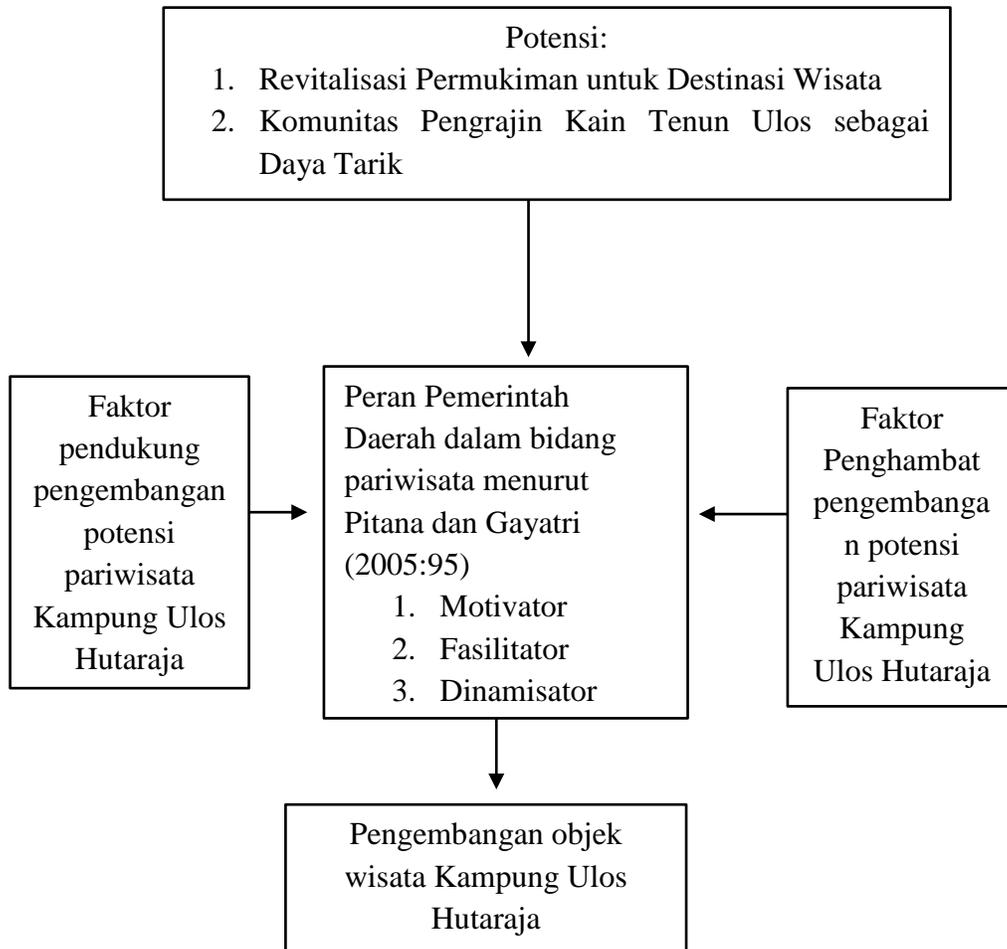
- b) Faktor-faktor yang berdampak pada pengembangan potensi pariwisata merupakan hal atau keadaan yang memengaruhi perkembangan sektor pariwisata. Terdapat beberapa faktor yang memainkan peran signifikan dalam pengembangan pariwisata, yaitu:

Tabel 1. 4 Konsep Operasional Faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi pariwisata

Konsep	Definisi	Dimensi Konsep
Atraksi	Daya tarik pariwisata merupakan faktor yang menarik bagi para wisatawan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikon sejarah dan kebudayaan</li> <li>2. Komunitas pengrajin tenun ulos</li> </ol>
Fasilitas	Fasilitas merupakan elemen yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan.	Fasilitas ini bervariasi seperti hotel, restoran, kafe, pusat informasi, pusat perbelanjaan dan souvenir.
Infrastruktur	Infrastruktur dalam pariwisata adalah segala fasilitas fisik dan nonfisik yang menunjang pengembangan pariwisata.	Infrastruktur yang dimaksud jaringan listrik dan komunikasi, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, sistem sanitasi, jalan raya dan keamanan
Transportasi	Faktor transportasi mengacu pada ketersediaan akses yang memudahkan perjalanan menuju destinasi pariwisata.	Sarana transportasi publik, stasiun bis, sistem keamanan penumpang, informasi perjalanan, kepastian tarif, dan peta kota menuju tujuan pariwisata.
Hospatiliti	Pelaku usaha mampu memenuhi kebutuhan wisatawan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keramah-tamahan masyarakat</li> <li>2. Pelayanan pelaku usaha</li> </ol>

## 1.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat digambarkan dengan bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



Sumber: data olahan (2022)

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang melalui pendekatan dalam mengeksplorasi suatu gejala sentral dengan melibatkan wawancara dengan partisipan penelitian, dimana pertanyaan yang diajukan bersifat umum dan menyeluruh. Kemudian informasi tersebut nantinya dikumpulkan, dianalisa, dan diinterpretasi lebih mendalam (Creswell, 2014). Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti berusaha menggambarkan kondisi lapangan dan melakukan analisis teliti terhadap setiap fenomena yang ditemui. Dalam konteks penelitian kualitatif deskriptif, penekanan diberikan pada perumusan pertanyaan penelitian untuk mengarahkan proses pengumpulan data secara langsung.

Maka, sesuai dengan definisi di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini dilakukan karena peneliti berupaya untuk menguraikan situasi di lapangan dan melakukan analisis yang menyeluruh terkait peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja di Kabupaten Samosir.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan lokasi dari objek penelitian, dimana peneliti mengumpulkan data, informasi, dan fakta-fakta terkait dengan objek yang sedang

diteliti. Lokasi penelitan ini adalah daerah wisata di Kampung Ulos Hutaraja dan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan orang yang mampu memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik *purposive sampling* digunakan dengan menetapkan kriteria khusus atau karakteristik tertentu sebagai pertimbangan dalam pemilihan sampel atau subjek penelitian. Menurut Rahmadi (2011:62), dalam menetapkan subjek penelitian kualitatif, digunakan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki pengalaman yang cukup lama dan terlibat secara intensif dalam bidang atau kegiatan yang menjadi fokus penelitian; (2) terlibat sepenuhnya dalam bidang atau kegiatan tersebut; dan (3) memiliki waktu yang memadai untuk memberikan informasi yang diperlukan. Berdasar kriteria tersebut, partisipan dalam penelitian ini melibatkan Kepala Bidang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi, Pokdarwis dan Komunitas pengrajin kain tenun ulos, dan para wisatawan.

### **1.9.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **A. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2013), data primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh oleh pengumpul data atau merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data bisa diperoleh melalui interaksi langsung

dengan informan melalui wawancara, yang meliputi perkataan, perilaku, keterangan, dan informasi yang dikumpulkan, serta melalui pengamatan dan pencatatan kejadian yang terjadi di lapangan. Untuk proses dilapangan peneliti pertama sekali mewawancarai dua pelaku usaha (penenun ulos), ketua pokdarwis, dan 5 wisatawan di Kampung Ulos Hutaraja. Selanjutnya peneliti mewawancarai Kabid Usaha Pariwisata dan Kerjasama (UPK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir. Selanjutnya untuk memperkuat data, peneliti mewawancarai Kepala Desa Lumban Suhi-Suh sebagai daerah lokasi Kampung Ulos Hutaraja.

## **B. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan literatur seperti buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Data juga diperoleh dari berbagai referensi, termasuk Badan Pusat Statistik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Desa Lumban Suhi-Suhi, serta instansi lain yang terkait dengan penelitian.

### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **A. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2017), wawancara adalah interaksi antara peneliti dan informan, termasuk *key informan*, dimana mereka bertukar informasi melalui pertanyaan dan jawaban untuk dikonstruksikan dalam konteks penelitian tertentu.

Wawancara berfungsi sebagai metode verifikasi terhadap keterangan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti bertanya langsung kepada narasumber yang terkait dengan isu penelitian atau kepada informan yang merupakan stakeholder dan individu yang memiliki kompetensi serta relevansi dalam pengembangan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja.

- a. Informan Kunci: Raja Sondang Simarmata, S.T, laki-laki, ia adalah Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi
- b. Informan Utama: Jontiner Sinabutar, S.P., M.M., laki-laki, ia adalah Kepala Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir.
- c. Informan Pendukung:
  - Gomgom Simarmata, perempuan, ia adalah Ketua Pokdarwis Tenun di Kampung Ulos Hutaraja.
  - Rohani Silalahi, perempuan, ia adalah pelaku usaha dan penunul ulos di Kampung Ulos Hutaraja.
  - Deril Simarmata, perempuan, ia adalah pelaku usaha dan penunul ulos di Kampung Ulos Hutaraja.

- Boy Tamba (laki-laki), Monang Nainggolan (laki-laki), Tufany Sitanggang (Perempuan), Ruth Simarmata (perempuan), Diana Moranta (perempuan) mereka adalah wisatawan.

## **B. Observasi**

Dalam Rahmadi (2011:80), pengamatan atau observasi merujuk pada tindakan melihat secara cermat. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai metode pencatatan sistematis terkait perilaku, yang dilakukan dengan cara melihat atau mengamati secara langsung tingkah laku individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian. Penulis menggunakan metode ini untuk menemukan hal-hal yang ternyata tidak dapat terungkap melalui wawancara dengan responden. Secara mendasar, teknik observasi digunakan untuk memperhatikan atau mengamati perubahan dalam fenomena sosial yang sedang berkembang, yang nantinya dapat dievaluasi untuk memahami perubahan tersebut secara lebih mendalam.

## **C. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan berbagai dokumen atau informasi yang terdokumentasi, baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman. Dokumen tertulis mencakup berbagai jenis seperti arsip, catatan harian, autobiografi, surat pribadi, kliping, dan sebagainya, sedangkan dokumen terekam meliputi film, rekaman audio, mikrofilm, foto, dan

sejenisnya (Rahmadi, 2011). Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan meneliti dokumen atau catatan dalam berbagai bentuk yang relevan. Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup informasi terkait pengembangan potensi pariwisata, yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kantor Desa, serta sumber informasi lain seperti media cetak dan media elektronik.

#### **1.9.6 Teknik Analisis dan Interpretasi Data**

Tahap analisis data dapat diartikan sebagai langkah-langkah untuk mengatur dan mengorganisir data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar tertentu. Selanjutnya, dilanjutkan dengan penafsiran atau interpretasi data, yang melibatkan pemberian makna yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola-pola yang teridentifikasi, dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi yang ada dalam analisis data (Rahmadi, 2011). Menurut Miles & Huberman (1992: 16), analisis data melibatkan tiga langkah kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni: mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis data yang diterapkan oleh peneliti terdiri dari langkah-langkah berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan tahapan dari teknik analisis data yang dilakukan dengan memilah, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang diperoleh di lapangan pada hal-hal yang penting. Reduksi data berguna untuk

menyederhanakan serta mentransformasikan data kualitatif ke dalam berbagai catatan melalui seleksi yang ketat. Dalam penelitian ini peneliti akan mereduksi data yang sudah didapat melalui teknik pengumpulan data baik data primer maupun sekunder.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang dapat dimungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan sebagai pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya berupa teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti agar data mudah dipahami. Dalam hal ini, peneliti akan menyajikan data yang terkait peranan pemerintah daerah khususnya Disbudpar Kabupaten Samosir, serta faktor-faktor yang menjadi mempengaruhi pengembangan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan harus didukung oleh data-data atau bukti yang valid. Kesimpulan ini merupakan inti atau pokok bahasan dari temuan penelitian yang telah dilakukan, biasanya juga terdapat pendapat peneliti. Penarikan kesimpulan harus sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan berupaya untuk menarik kesimpulan dari pembahasan terkait peranan pemerintah daerah khususnya Disbudpar Kabupaten Samosir, serta faktor-faktor

yang menjadi mempengaruhi pengembangan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja.

### **1.9.7 Validasi Data**

Validitas data diperlukan untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini. Artinya, validitas memiliki makna sebagai ketepatan alat ukur. Dasar validitas data terletak pada keyakinan bahwa hasil penelitian mencerminkan akurasi dari perspektif peneliti, partisipan, dan pembaca umum (Creswell & Miller, 2000). Keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan fondasi yang kokoh untuk membuat kesimpulan. Untuk meningkatkan keabsahan tersebut, penulis dapat mengurangi subjektivitas dengan menerapkan triangulasi.

Triangulasi adalah sebuah teknik untuk memastikan keabsahan data dengan menggunakan sumber lain di luar data itu sendiri untuk melakukan perbandingan terhadap data tersebut (Moleong, 2011: 330). Untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya, data diperoleh melalui wawancara akan diperiksa melalui pengamatan, dan sebaliknya, data yang diperoleh dari pengamatan akan diperiksa melalui wawancara kepada responden.

Dalam studi ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada beberapa sumber yang berbeda. Dengan demikian, tujuan utama dari triangulasi adalah membandingkan informasi yang sama dari beberapa pihak untuk memastikan kepercayaan data dan mengurangi subjektivitas peneliti, serta memverifikasi data di luar subjek.